



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR BAGAN.....	4
KATA PENGANTAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	6
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	8
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	12
E. Isu Strategis	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	15
B. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi.....	16
C. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	21
B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	41
BAB IV PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	9
Tabel 1. 2 Jumlah Posisi Pegawai	12
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Pemeriksa	12
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender	13
Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	13
Tabel 2. 1 Target Indikator Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu	18
Tabel 2. 2 Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022	19
Tabel 3. 1 Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2022	21
Tabel 3. 2 Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan	23
Tabel 3. 3 Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan.....	24
Tabel 3. 4 Realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan .	25
Tabel 3. 5 Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja.....	26
Tabel 3. 6 Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	28
Tabel 3. 7 Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja.....	28
Tabel 3. 8 Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.....	30
Tabel 3. 9 Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	32
Tabel 3. 10 Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	33
Tabel 3. 11 Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan.....	34
Tabel 3. 12 Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	36
Tabel 3. 13 Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	37
Tabel 3. 14 Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	40
Tabel 3. 15 . Anggaran dan Realisasi Belanja.....	41
Tabel 3. 16 Anggaran dan Realisasi.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Posisi Pegawai	12
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Pemeriksa	12
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender	13
Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	13
Gambar 2. 1 Rapat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	20

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	8
Bagan 2. 1 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	15
Bagan 2. 2 Framework Renstra BPK 2020-2024	17
Bagan 3. 1 . Anggaran dan Realisasi Belanja.....	41

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan tolak ukur atas siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Secara garis besar, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menunjukkan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 sebesar **98,96**. Masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2022.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur serta menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mendukung perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, 31 Januari 2023
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Kepala Perwakilan,

Muhamad Toha Arafat
NIP. 197212271997031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;

3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
18. penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen tersebut BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai satuan kerja menyusun Laporan Kinerja.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu



Keterangan:

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Perwakilan	Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA, CFrA
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	Maula Rusindrawan S.Kom., ENSA, M.M., CertDA
3	Kepala Subauditorat Bengkulu I	Ranni Agriadi, S.E., M.Si., Ak., CA
4	Kepala Subauditorat Bengkulu II	Ronald Sinaga S.E., MIM., Ak., CA, CSFA
5	Kasubag Humas dan TU Perwakilan	Rony Setyo Kurniawan, S.Sos.
6	Kasubag SDM	Adhy Chahyo Nugroho, S.E.
7	Kasubag Keuangan	Zuniar Viki Fardiyanta S.ST
8	Kasubag Umum dan TI	Iwan Sukma Permana, S.T., M.M.
9	Kasubag Hukum	Sandi Indra Prasetya SH., LL.M.

Tabel 1. 1 Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

1. Subauditorat Bengkulu I

Subauditorat Bengkulu I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

2. Subauditorat Bengkulu II

Subauditorat Bengkulu II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

3. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- b. Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu posisi per 31 Oktober 2022 berjumlah 141 orang meliputi 9 personil struktural (6%) yang terdiri dari 1 Kepala Perwakilan, 2 Kepala Subauditorat, 1 Kepala Sekretariat Perwakilan, dan 5 Kepala Subbagian, 17 personil di unit kerja penunjang pendukung (12%), 50 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat (35%). BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga memiliki pegawai tidak tetap (tenaga kontrak) sebanyak 22 orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 43 orang, sehingga total seluruhnya 141 pegawai.

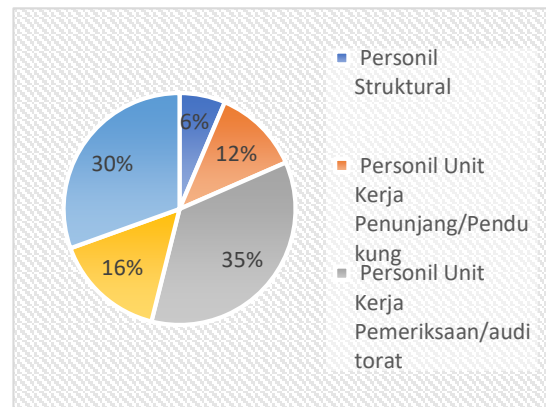
Berdasarkan jenjang pendidikan, SDM BPK Perwakilan Bengkulu (pegawai tetap) terdiri dari: sebanyak 13 orang berjenjang pendidikan S2 (9%), 100 orang berjenjang pendidikan S1 (71%), 10 orang berjenjang pendidikan D3 (10%), serta sisanya 18 orang berjenjang pendidikan setingkat SMU/SMK/SMEA (13%).

Berdasarkan jenis kelamin, SDM BPK Perwakilan Bengkulu (pegawai tetap) terdiri dari 84 orang pria (60%) dan 57 orang wanita (40%).

Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan jumlah 50 orang terdiri atas 3 orang Pemeriksa Madya (6%), 5 Pemeriksa Muda (10%), dan 42 orang Pemeriksa Pertama (84%).

c	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Personil Struktural	9	6%
2.	Personil Unit Kerja Pemeriksaan	50	35%
3.	Personil Unit Kerja Penunjang	17	12%
4.	Pegawai Tidak Tetap	22	16%
5.	CPNS	43	30%
Jumlah		141	100%

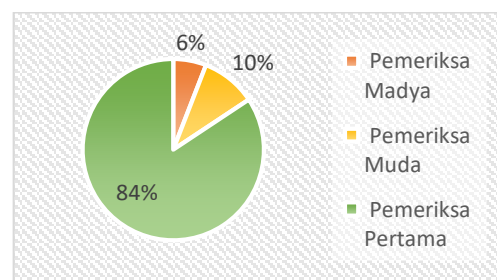
Tabel 1. 2 Jumlah Posisi Pegawai



Gambar 1. 1 Jumlah Posisi Pegawai

No.	Uraian Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Pemeriksa Madya	3	6%
2.	Pemeriksa Muda	5	10%
3.	Pemeriksa Pertama	42	84%
Jumlah		50	100%

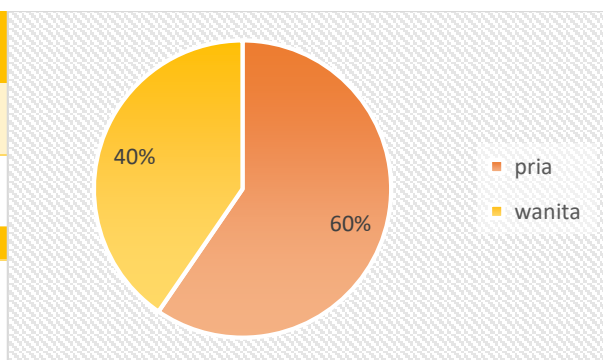
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Pemeriksa



Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Pemeriksa

No.	Uraian Gender	Jumlah	Persentase
1.	Pria	84	60%
2.	Wanita	57	40%
Jumlah		141	100%

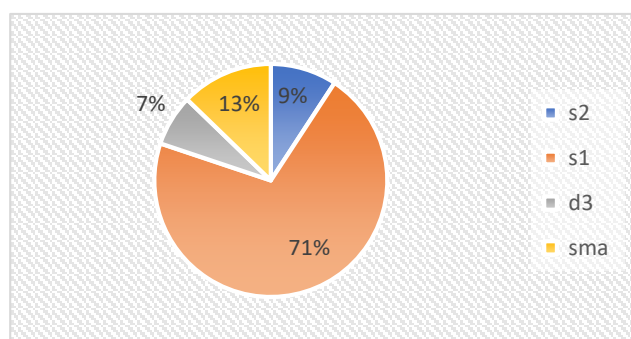
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

No.	Uraian Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	13	9%
2.	S1/D4	100	71%
3.	D3	10	7%
4.	SMU/SMEA/ SMK	18	13%
Jumlah		141	100%

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan perlu diperhatikan dalam mencapai visi dan misi, meliputi hal-hal berikut:

1. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
2. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
3. Sinergi dan kolaborasi pemeriksaan antar satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;
4. Pengimplementasian dan pemanfaatan *big data analytics* perlu lebih dioptimalkan;
5. Keterlibatan BPK dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat;
6. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah;
7. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu;
8. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada; dan

9. Kebutuhan Pemeriksa yang memiliki Peran Ketua Tim dan Staf Penunjang belum mencukupi.

BAB II

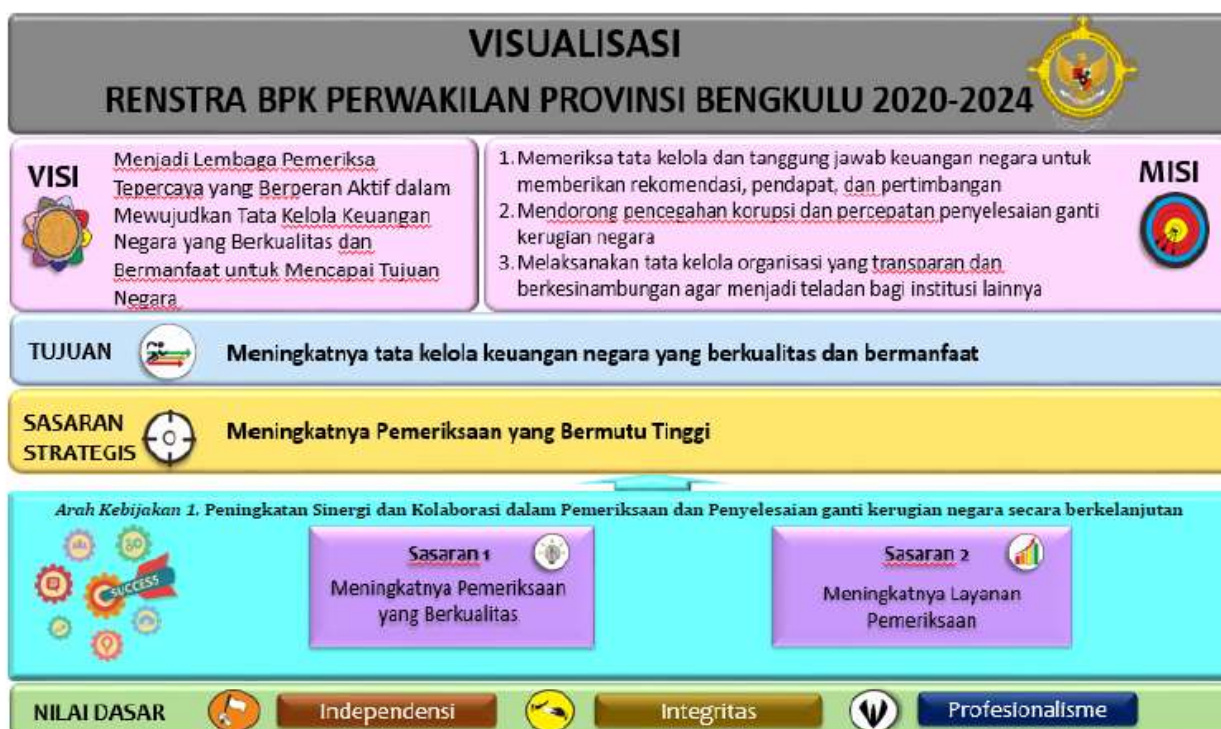
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang berisikan berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Rentra BPK Wide. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Visi BPK yaitu Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.
2. Misi BPK yaitu a) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; b) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan c) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.
3. Nilai Dasar BPK, pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:
 - a. Integritas, BPK membangun nilai integritas mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
 - b. Independensi, BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
 - c. Profesionalisme, BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
4. Tujuan Strategis yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.
5. Sasaran Strategis, dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya pemeriksaan yang

bermutu tinggi”. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini diperlukan penyempurnaan pada proses internal BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait peningkatan kualitas pemeriksaan, dan peningkatan layanan pemeriksaan. Penyempurnaan proses internal ini akan dapat terwujud melalui penguatan modal dasar organisasi meliputi peningkatan kualitas organisasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Keseluruhan strategi tersebut merupakan sasaran-sasaran strategis yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dan terangkai dalam Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana diilustrasikan seperti di bawah ini.



B. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendukung arah kebijakan BPK dalam Renstra 2020-2024 sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bagan 2. 2 Framework Renstra BPK 2020-2024



Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis
- Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif
- Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara
- Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

Arah kebijakan 2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Target kinerja merupakan target pencapaian Sasaran Strategis Satker dalam peta strategis masing-masing satker selama lima tahun ke depan. Di samping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan ukuran keberhasilannya (IKU) sebagai berikut.

Tujuan Strategis	IKU		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat							
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	A 90,05
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu

C. Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V). Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022:

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	•Meningkatnya kualitas pemeriksaan	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	• Meningkatkan layanan pemeriksaan	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A 88,00
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%

Tabel 2. 2 Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022



Gambar 2. 1 Rapat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 berdasarkan hasil validasi yaitu sebesar **98,96**. Skor kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pencapaian skor tahun 2021 yaitu sebesar 97,14.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022	
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	89.17	100%	89.17%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	98.09	75%	73.57%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,57	100%	100,57%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100.00	100%	100.00%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,96	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	98.20	5	4.91
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	102.70	88	90.38
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	93.34	97%	90.54%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100.71	100%	100.71%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	105	3.80	4.11
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	94.59	100%	94,59%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	99.14	88%	87.25%

Tabel 3. 1 Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Secara keseluruhan, capaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 - c. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
 - d. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - e. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
 - f. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.
2. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai sama/sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.
3. Terdapat 4 (empat) Indikaotr Kinerja Utama (IKU) yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 6 Tingkat Pememuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
 - b. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP;
 - c. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
 - d. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentignan atas Kualitas Komunikasi.

Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Triwulan Tahun 2022:

IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan ini sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP), Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) serta hasil evaluasi EPP dan hasil reuiu Itama. Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Tabel 3. 2 Realisasi IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
	2022	2022	2022	2021
1 Tingkat Pemenuhan Pengendalian Dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	89.17	100%	89.17%	88,33%

Realisasi IKU 1 Tingkat Pemenuhan Pengendalian Dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan tahun 2022 adalah sebesar 89.17. pada tahun 2022. Capaian IKU 1 belum memenuhi target yang diharapkan, adapun uraian Skor QA dan QC satuan kerja 100%, tingkat Konsistensi atas LHP 58,33%, dan tingkat akurasi atas LHP 91,7%. Dengan demikian, nilai IKU 1 tahun 2022 adalah sebesar 89.17.

Adapun perbandingan realisasi capaian IKU 1 Pada tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta target capaian jangka menengah dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja				Target					Realisasi
IKU 1	Pemenuhan Pemerolehan Pemeriksaan	Pengendalian Keyakinan	dan Mutu	2020	2021	2022	2023	2024	2022
				100%	100%	100%	100%	100%	89.17%

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa persentase realisasi capaian kinerja tahun 2021 jika target jangka menengah lainnya adalah sebesar 88,33%. Persentase ini tentu saja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Analisis mengenai penyebab tidak tercapainya target kinerja IKU 1 adalah sebagai berikut.

a. Penyebab

Realisasi capaian IKU 1 belum dapat memenuhi target ini disebabkan oleh evaluasi Direktorat EPP atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang mendapatkan nilai 78,333%. Bila dirinci lebih lanjut, kekurangan nilai tersebut disebabkan oleh penilaian tingkat konsistensi atas LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang hanya mendapatkan nilai 58,33% dan tingkat akurasi atas LHP sebesar 91,67%. Hal ini mengindikasikan masih terdapat ketidakkonsistenan antara unsur temuan dengan lampiran, uraian dalam kondisi, serta rujukan dalam lampiran. Sedangkan tidak tercapainya tingkat akurasi pada LHP mengindikasikan penghitungan ulang baik secara vertikal maupun horizontal atas angka yang tersaji dalam LHP belum sepenuhnya tepat.

b. Alternatif yang dilakukan

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan berupaya membentuk Tim *Checker* (memberdayakan auditor khusus) yang mempunyai ketelitian dan keahlian dalam melakukan pengecekan terutama akurasi dan konsistensi untuk meningkatkan perhatian pada kesalahan konsistensi

dan akurasi yang terjadi pada tahun sebelumnya guna meningkatkan kinerja reviu konsep LHP secara redaksional dan berjenjang sebelum diterbitkannya LHP.

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Bengkulu telah melaksanakan 11 Pemeriksaan LKPD, 2 Pemeriksaan Kinerja, dan 5 Pemeriksaan PDTT. Salah satu bentuk pengendalian yang telah dilakukan untuk menjamin mutu dan kualitas pemeriksaa adalah dengan dilakukannya pengendalian melalui formulir *Quality Assurance* dan *Quality Control*.

IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tabel 3. 3 Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
			2022	2021
2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100	100%	100%	100%

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan tahun 2022 adalah sebesar 100.

Perbandingan realisasi capaian IKU 2 pada tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah dapat dilihat pada table berikut ini:

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Apabila dibandingkan dengan target pada capaian jangka menengah lainnya, realisasi capaian IKU 2 tahun 2022 telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada Rencana Strategis yaitu senilai 100%.. Selanjutnya, langkah strategis yang diperlukan guna mempertahankan capaian ini, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan terus menghimbau agar penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dilakukan

secara lebih teliti, cermat serta efektif, agar memberikan kesesuaian terhadap harapan penugasan atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan

IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 3. 4 Realisasi IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian		
			2022	2021	
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	98.09	75%	73,57%	69,86%

Perbandingan realisasi capaian IKU 3 pada tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2022	
	2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	73,57%

Sampai dengan tahun 2022 terdapat 10.789 rekomendasi yang telah disampaikan ke Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut terdapat 7.867 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (72,92%), 2.530 rekomendasi yang belum selesai atau masih dalam proses (23,45%), 322 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (2,98%), dan 70 rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti (0,65%). Analisis mengenai penyebab tidak tercapainya target kinerja IKU 3 adalah sebagai berikut.

a. Penyebab

Capaian IKU 3. tahun 2022 sebesar 73,57% dengan nilai 98,09 atau belum mencapai target yang diharapkan disebabkan sebagian besar entitas telah menindaklanjuti rekomendasi, namun rekomendasi yang ditindaklanjuti masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut. Selain itu, terdapat kecenderungan kurangnya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya kurang proaktifnya entitas dalam mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut.

b. Alternatif yang dilakukan

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara berkala telah melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah di

wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu selain mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (SiPTL), juga membuka ruang konsultasi melalui helpdesk TLRHP dan mendorong kepada entitas untuk menginventarisir tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun-tahun yang telah lama agar segera dapat diselesaikan, baik yang mudah ditindaklanjuti menjadi status 1 (selesai ditindaklanjuti) maupun yang sulit ditindaklanjuti menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah) dengan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 3. 5 Realisasi IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
			2022	2021
4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,57	100%	100,57%	100,52%

Perbandingan realisasi capaian IKU 4 pada tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah dapat dilihat pada table berikut ini:

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional, skor IKU 4 ini ditargetkan bernilai 100% dan pada tahun 2022 realisasi capaian IKU ini senilai 100,57%. Hal ini menunjukkan tercapainya realisasi dibandingkan dengan target. Per semester II Tahun 2022, BPK Perwakilan Bengkulu telah melaksanakan 1 pemeriksaan kinerja dan 5 pemeriksaan PDDT, dimana 2 pemeriksaan dimana tiga pemeriksaan diantaranya termasuk ke dalam pemeriksaan signifikan lainnya yang secara nasional meliputi:

- a. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) TA 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Kaur dan Instansi Terkait Lainnya di Bintuhan.
- b. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2021 s.d Oktober 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Instansi Terkait Lainnya di Karang Tinggi



Tercapainya target Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional disebabkan oleh upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk mengikuti Pemeriksaan Tematik yang menjadi tema nasional secara keseluruhan. Pada tahun-tahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan terus berupaya menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan secara lebih cermat dan teliti dengan tetap menyesuaikan dengan Rencana Kegiatan Tahunan BPK dan sesuai dengan tema serta fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BPK. Selain hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga terus berkomitmen dan mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi para pemeriksa agar tetap mampu melaksanakan pemeriksaan tematik nasional pada periode yang akan datang.

IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat

responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Tabel 3. 6 Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
		2022	2022	2022	2021
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi capaian IKU 5 pada tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Belum terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan APH sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022, sehingga tingkat pemenuhan pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 masih sebesar 100%, sesuai dengan target tahunan.

IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis,RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 3. 7 Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
		2022	2022	2022	2021
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,96	100%	100,96%	100%

Adapun Perbandingan realisasi IKU 6 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	400%



Sampai dengan periode Semester II Tahun 2022 terdapat lima Pemeriksaan Tematik Lokal yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan (LFAR) TA 2021 pada Pemprov Bengkulu;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) Tahun 2021 dan 2022 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Bengkulu; Pemeriksaan Pendahuluan atas Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022;
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal TA 2022 pada Pemkab Mukomuko;
4. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal TA 2022 pada Pemkab Kepahiang.

5. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Hibah Dana BOS TA 2022 pada Pemkab Rejang Lebong

Realisasi IKU 6 sebesar 100,96% ini telah memenuhi target yang ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 100% dan jumlah pemeriksaan telah sesuai dengan RKP yang disusun. Langkah yang akan dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang konsisten sampai akhir periode adalah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan lebih cermat dan lebih sensitif dalam menentukan tema pemeriksaan dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan daerah maupun nasional yang tercantum dalam RPJMD.

IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Skala hasil survei sebagaimana berikut.

- a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Tabel 3. 8 Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor	Target	Capaian	
				2022	2021
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,91	5,00	4,91	4,38

Adapun Perbandingan realisasi IKU 7 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 7	5	5	5	5	5	4,91

Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menunjukkan skor sebesar 4,91. Realisasi ini belum sesuai dengan target Tahun 2022 yaitu 5,00. Realisasi IKU 7 ini mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya yang memperoleh skor 4,38. Adapun langkah yang sudah ditempuh untuk mendorong pencapaian IKU ini BPK Perwakilan Bengkulu akan melakukan langkah berikut.

- a. Memberikan pengarahan terkait penguatan implementasi nilai-nilai dasar BPK.
- b. Memberikan teladan yang baik mengenai pengamalan nilai-nilai dasar BPK dimulai level teratas agar menjadi motivasi bagi seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.



IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Tabel 3. 9 Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
	2022	2022	2022	2021
8 Hasil Evaluasi AKIP	102,70	88,00	90,38 (AA)	84,82 (A)

Adapun Perbandingan realisasi IKU 8 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	2020	2021	Target			Realisasi 2022
			2022	2023	2024	
IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,00)	AA (90,38)

Pada tahun 2022, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memperoleh penilaian dari Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor 226/ND/XI/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dengan nilai sebesar 90,338 atau dengan predikat “AA” (Sangat Memuaskan). Realisasi ini sudah memenuhi target yang telah dimuat dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar A (88,00). Realisasi ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang mendapatkan penilaian dengan hasil A (84,82). Dengan demikian nilai capaian IKU 8 tahun 2021 adalah sebesar 102,70.

Adapun langkah yang ditempuh oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu demi tercapainya target kinerja IKU 8 adalah sebagai berikut.

a. Langkah yang dilakukan

Menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang pelaporan kinerja pada unit-unit kinerja pelaksana BPK.

b. Alternatif yang sudah dilakukan

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 dengan memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Inspektur Utama. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga berkomitmen akan terus meningkatkan realisasi implementasi AKIP pada periode kedepan dengan melalui perbaikan yang dimulai dari Penyusunan Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK), pendokumentasian capaian IKU setiap Triwulannya hingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan dengan menyajikan informasi yang akuntabel dan relevan atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan.

IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, e-Drive, Portal), layanan aplikasi SISDM, layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, e-Audit, SIPTL) serta layanan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang telah ada di BPK, antara lain Portal BPK, JDIH, dan sebagainya. Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi user untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tabel 3. 10 Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
		2022	2022	2022	2021
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	93,34	97%	90,54%	99,04%

Adapun Perbandingan realisasi IKU 9 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2021
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	99%	90,54%

Pada tahun 2022, Perwakilan Provinsi Bengkulu memperoleh nilai tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dari Biro TI dengan rincian sebagai berikut (1) Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SISDM sebesar 99,59%, (2) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 85,60%, (3) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP sebesar 100% , (4) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP sebesar 79,37% , (5) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL sebesar 87,62% atau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian Layanan	Nilai Pemanfaatan TIK
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM	99,59%
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN	85,60%
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP	100%
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP	79,37%
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL	87,62%
Rata-rata pemanfaatan TIK	90,54%

Dari hasil evaluasi Biro TI di atas diketahui bahwa Perwakilan Provinsi Bengkulu masih belum optimal dalam pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SiAP dan SIPTL hal tersebut disebabkan oleh pegawai yang belum memanfaatkan secara maksimal layanan yang sudah disediakan oleh BIRO TI, selanjutnya BPK Bengkulu akan berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang sudah disediakan dalam mendukung tugas dan fungsi pegawai dalam menjalankan pekerjaannya di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. dengan demikian nilai IKU 9 adalah sebesar 93,34.

IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Tabel 3. 11 Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2022	Target 2022	Capaian	
			2022	2021
10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100,71	100%	100,71%	75%

Adapun Perbandingan realisasi IKU 10 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100,71%

Jumlah *Best-Practice* yang disusun tahun 2022 adalah sebanyak 1 (satu) atau sama dengan jumlah usulan Best Practice yang direncanakan untuk disusun yaitu sebanyak 1 (satu). *Best-practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best-practice*.

Pada tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan usulan *Best Practice* yang disampaikan kepada Direktorat PSMK yaitu usulan *Best Practice* terkait “Penerapan Panduan atas Penyusunan LHP LKPD untuk Meminimalkan Kesalahan Penulisan LHP pada Subauditorat Bengkulu II BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu”. Berdasarkan nota dinas dari Kepala Direktorat PSMK nomor 757/ND/XII.I/12/2022 menyatakan bahwa usulan Best Practice tersebut dapat diakui sebagai capaian Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022.

Selanjutnya BPK Perwakilan Bengkulu juga telah melakukan beberapa aktivitas manajemen pengetahuan diantaranya sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan pelatihan yaitu berupa Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2021;
- b. *Knowledge Transfer Forum* (KTF) berupa Panduan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan;
- c. *Peer Assist* yaitu Penggunaan Aplikasi Jasmin;
- d. *Mentoring* yaitu berupa Prosedur Kerja pada Subbagian Keuangan.

Realisasi IKU 10 Tahun 2022 adalah sebesar 100,71%, hal ini sudah memenuhi target sebagaimana yang telah dimuat dalam perjanjian kinerja yaitu 100%, hal ini terjadi peningkatan dibandingkan realiasi tahun 2021 sebesar 75%.

Analisis mengenai peningkatan realiasi tercapainya target kinerja IKU 10 adalah sebagai berikut.

- a. Langkah yang dilakukan

Komponen penilaian IKU manajemen pengetahuan diukur dari tingkat penyusunan *Best Practice*, Tingkat penerapan *Best Practice*, dan tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memenuhi tingkat penyusunan *Best Practice* yang dipersyaratkan yaitu 1 dan tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan yang dipersyaratkan yaitu 4 dengan jenis kegiatan yang berbeda-beda yaitu

Diklat, KTF, Peer Assist dan Mentoring yang masing-masing satu kegiatan Manajemen Pengetahuan.

b. Alternatif yang sudah dilakukan

Dengan dibentuknya Tim Manajemen Pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah lebih tertib dalam melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan serta mendokumentasikan dengan baik semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas manajemen pengetahuan dengan lebih baik lagi, serta menyusun suatu rencana aksi mengenai kegiatan-kegiatan serta *best practice* yang akan direalisasikan dalam satu periode waktu.

IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei sebagaimana berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Tabel 3. 12 Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor	Target	Capaian	
				2022	2021
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	105,00	3,80	4,11	3,91

Adapun Perbandingan realisasi IKU 11 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,11

Survei Pengukuran Indikator yang mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendapatkan skor sebesar 4,11. Realisasi ini telah memenuhi dari target yang ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu 3,80. Realisasi IKU ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mendapatkan realisasi sebesar 3,91. Langkah yang akan dilakukan agar pencapaian IKU ini dapat konsisten hingga akhir periode sebagai berikut.

- Menyediakan wadah komunikasi bagi para pemangku kepentingan khususnya para pemerintah daerah
- Meningkatkan pola komunikasi baik dengan para *stakeholders* BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
- Menjadi penyedia informasi dan penyedia layanan publik bagi seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat di lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengoptimalkan penggunaan E-PPID.

IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut: Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN), Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU No.5 Tahun 2014). Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Tabel 3. 13 Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2022	Target	Capaian	
			2022	2021
12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	94,59	100%	94,59%	100%

Adapun Perbandingan realisasi IKU 12 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022
		2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	94,59%

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelenggarakan Diklat LKPD berbasis Akrual sebagai persiapan dan sarana memperbaharui wawasan pemeriksa sebelum dilaksanakannya pemeriksaan LKPD.. Sampai dengan batas *cut off* pelaporan IKU, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 70 dari 74 pegawai Bengkulu telah memenuhi jam diklat sehingga persentase pencapaian pemenuhan jam diklat pegawai sebagai kegiatan pengembangan kompetensi pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebesar 94,59% atau belum memenuhi target yang telah ditentukan pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dengan demikian, nilai IKU 12 tahun 2022 adalah sebesar 94,57%.

Langkah yang akan dilakukan agar pencapaian IKU ini konsisten adalah dengan melakukan perencanaan dan monitoring yang baik atas kegiatan pengembangan kompetensi pegawai sesuai prioritas pembelajaran masing-masing.

Analisis mengenai penyebab tidak tercapainya target kinerja IKU 12 adalah sebagai berikut.

a. Penyebab

Komponen penilaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi diukur dari tingkat keikutsertaan pegawai dalam memenuhi jam diklatnya yaitu 40 JP untuk pemeriksa dan 20 JP untuk non pemeriksa. Namun untuk 2022 masih terdapat 4 pegawai yang belum memenuhi jam diklatnya sehingga realisasi tidak mencapai target.

b. Alternatif yang dilakukan

BPK Bengkulu akan lebih cermat dalam melakukan pengelolaan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi serta mendokumentasikan dengan baik terkait pemantauan Jam diklat seluruh pegawai, dan terus mendorong pegawai untuk dapat mengikuti diklat yang sesuai dengan pekerjaan maupun minatnya dengan selalu menawarkan diklat tersedia yang diselenggarakan oleh Badiklat maupun Balai Diklat.

Dengan demikian, nilai IKU 12 tahun 2022 adalah sebesar 94,59



Gambar 1. Diklat LKPD Tahun 2022

IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran

IKU ini mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3) Pencapaian keluaran
- 4) Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan diukur melalui satu IKU, yaitu IKU 13 terkait Tingkat Kinerja anggaran di Lingkungan Perwakilan dengan target tahun 2022 sebesar 88%.

Tabel 3. 14 Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor	Target	Capaian	
			2022	2021
13 Tingkat Kinerja Anggaran	99,14	88%	87,25%	90,03%

Adapun Perbandingan realisasi IKU 13 tahun 2022 dengan target kinerja tahun 2022 serta capaian target jangka menengah disajikan pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Target					Realisasi 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	87,25%

Pada tahun 2022, Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan penilaian dari Biro Keuangan atas penilaian IKPA dan EPA dengan nilai sebesar 87,25%. Realisasi ini belum memenuhi target yang telah dimuat dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 88%. Realisasi ini juga mengalami penurunan dari tahun 2021 yang mendapatkan penilaian dengan realisasi 90,03%. Dengan demikian nilai capaian IKU 13 tahun 2022 adalah sebesar 99,14. Langkah yang akan dilakukan agar pencapaian IKU ini konsisten adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja pengelolaan keuangan dan anggaran, pencapaian target output, penyerapan anggaran, penyusunan rencana penarikan dana hingga pencairannya.
- b. Menyusun laporan bulanan kegiatan pelaksanaan Perwakilan setiap bulannya untuk memastikan seluruh kegiatan dan output perwakilan telah tercapai sesuai rencana.
- c. Memperbaiki perencanaan anggaran yang dilakukan mengingat konsistensi antara perencanaan dan implementasi merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja anggaran.

B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Realisasi Belanja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu hingga tahun 2022 adalah sebesar Rp18.286.624.080 atau 99,63% dari anggaran belanja sebesar Rp18.354.472.000. Rincian anggaran belanja TA 2022 dan Realisasi Belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 15 . Anggaran dan Realisasi Belanja
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022**

Ko de	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	6.079.876.000	6.032.258.156	99,22%	4.607.939.000	4.584.177.533	99,48%
52	Belanja Barang	11.789.194.000	11.777.574.764	99,90%	12.510.371.000	12.407.522.780	99,18%
53	Belanja Modal	485.402.000	476.791.160	98,23%	1.447.623.000	1.446.298.950	99,91%
	Pengembalian Belanja	0	-	0%	0	540,410	
		18.354.472.000	18.286.624.080	99,63%			

**Bagan 3. 1 . Anggaran dan Realisasi Belanja
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022**

Adapun realisasi belanja yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan berupa Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 3. 16 Anggaran dan Realisasi
RKP Tahun Anggaran 2022**

No	Jenis Keluaran	Kegiatan/Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	17	17	LHP	100%	3.309.703.000	3.299.676.973	99,70%
2	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	112	112	LHP	100%	119.292.000,00	119.291.600	100,00%

No	Jenis Keluaran	Kegiatan/Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
3	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1	1	LHP	100%	528.420.000	528.418.567	100%
4	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	1	Laporan	100%	1.000.000	1.000.000	100%
5	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	Laporan	100%	38.985.000	38.984.277	100,00%
6	Laporan Profil Entitas Perwakilan	11	11	Laporan	100%	1.000.000	892.650	89,27%
7	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	22	22	Laporan	100%	107.369.000	107.350.000	99,98%
8	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	22	22	Laporan	100%	174.964.000	174.862.400	99,94%
9	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	15	15	Laporan	100%	2.022.895.000	2.022.781.736	99,99%
10	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	12	12	Laporan	100%	297.402.000	297.343.355	99,98%
Jumlah					100%	6.601.030.000	6.590.601.558	99,84%

Secara lebih rinci, uraian atas realisasi anggaran RKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2022 akan diuraikan pada bagian berikut:

1. LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan 17 output LHP dengan anggaran sebesar Rp3.309.703.000 dan realisasi sebesar Rp3.299.676.973 atau sebesar 99,70%. 17 LHP tersebut terdiri dari, 10 LHP LKPD, 2 LHP Pemeriksaan Kinerja, dan 5 LHP Pemeriksaan PDTT.
2. LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan 112 output berupa LHP dari total target sebanyak 112 LHP atas Dana Banpanrpol pada Partai Politik di lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.292.000 dan telah terealisasi sebesar Rp119.291.600 atau sebesar 100%.

3. **Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan**
Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan satu Rumusan Bahan Pendapat dan telah disampaikan kepada Kepala Direktorat EPP melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan No. 296/ND/XVIII.BKL/12/2022 dengan judul Hibah Pemerintah Daerah Kepada Instansi Vertikal di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017 s.d 2021. Atas output ini BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menganggarkan Rp1.000.000 dan terealisasi sebesar 1.000.000 atau sebesar 100%.
4. **Sumbangan IHPS Perwakilan**
Sepanjang tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan 2 keluaran/output sumbangan IHPS dengan total anggaran sebesar Rp38.985.000 dan telah terealisasi sebesar Rp38.984.277 atau sebesar 100%.
5. **LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan**
Pada tahun 2022, guna mendukung pemeriksaan LKPD TA 2021, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menggunakan jasa KAP yang bekerja untuk dan atas nama BPK dalam melaksanakan Pemeriksaan untuk LKPD TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kaur, dan telah menghasilkan output berupa 1 LHP oleh KAP dengan alokasi anggaran sebesar Rp528.420.000 dan telah terealisasi sebesar Rp528.418.567 atau sebesar 100%.
6. **Laporan Profil Entitas Perwakilan**
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan 11 output berupa Laporan Profil Entitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp1.000.000 atau sebesar 100%.
7. **Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu**
Sepanjang tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan 22 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dengan anggaran sebesar Rp107.369.000 dan telah terealisasi sebesar Rp107.350.000 atau sebesar 99,98%.
8. **Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu**
Sepanjang tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan 22 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dengan anggaran sebesar Rp174.964.000 dan telah terealisasi sebesar Rp174.862.400 atau sebesar 99,94%.
9. **LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu**
Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan 15 output LHP Pendahuluan dari total target sebanyak 15 LHP Interim/Pendahuluan dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.022.895.000 dan telah terealisasi sebesar Rp2.022.781.736 atau sebesar 99,99%.
10. **Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan**
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan 12 output layanan administrasi pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp297.402.000 dan realisasi sebesar Rp297.343.355 atau senilai 99,98%.

Sedangkan, berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Penunjang (RKSP), pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.753.442.000 dan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp11.701.512.913 atau sebesar 99,56%. Adapun berbagai output/keluaran yang telah dihasilkan sampai dengan bulan Desember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Keluaran	Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	100%	10.195.505.000	10.152.811.283	99,58%
2.	Layanan Sarana Internal	25	25	Unit	100%	293.402.000	285.277.310	97,23%
3.	Layanan Prasarana Internal	21	21	Unit	100%	192.000.000	191.513.850	99,75%
4.	Layanan Manajemen Internal	21	21	Laporan	100%	1.072.535.000	1.071.910.470	99,94%

Adapun uraian atas realisasi anggaran Rencana Kerja Sekretariat Penunjang (RKSP) tahun 2021 pada BPK Perwakilan, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah merealisasikan satu layanan perkantoran dengan total anggaran sebesar Rp10.195.505.000,00 dan telah terealisasi 99,58% atau sebesar Rp10.152.811.283. Realisasi tersebut secara optimal telah digunakan untuk membiayai kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

- 1.1. Pembayaran Gaji Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp6.079.876.000 dan realisasi sebesar Rp6.037.748.547 atau sebesar 99,31%;
- 1.2. Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan dengan anggaran sebesar Rp277.309.000 dan realisasi sebesar Rp277.296.861 atau sebesar 100%;
- 1.3. Layanan Perkantoran Bidang Humas dengan anggaran sebesar Rp18.600.000 dan realisasi sebesar 100% atau sama dengan Rp18.600.000,00;
- 1.4. Layanan Perkantoran bidang Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp537.441.000 dan realisasi sebesar Rp537.438.121 atau sebesar 100%;
- 1.5. Layanan Perkantoran Bidang Keuangan dengan anggaran sebesar Rp268.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp268.787.059,00 atau sebesar 100%;
- 1.6. Layanan Perkantoran Umum dan TI dengan anggaran sebesar Rp2.546.588.000 dan telah terealisasi sebesar Rp2.546.301.566 atau sebesar 99,99%.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah merealisasikan 48 output, yang secara berurutan terdiri dari 25 unit Layanan Sarana Internal dan 21 unit Layanan Prasarana Internal dengan total anggaran sebesar Rp485.402.000 dan telah terealisasi 98,49% atau sebesar Rp476.791.160

3. Layanan Manajemen Internal Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah merealisasikan 21 Laporan Manajemen Internal Perwakilan dengan total anggaran sebesar Rp1.072.535.000 dan telah terealisasi 99,94% atau sebesar Rp1.071.910.470, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1. Layanan Tata Usaha Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp84.038.000 dan telah terealisasi sebesar Rp83.903.117 atau sebesar 99,84%;
- 3.2. Layanan Humas Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp105.473.000 dan telah terealisasi sebesar Rp105.442.134 atau sebesar 99,97%;
- 3.3. Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan dengan alokasi anggaran Rp257.233.000 dan telah terealisasi sebesar Rp256.985.056 atau sebesar 99,90%;
- 3.4. Layanan Keuangan Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp219.744.000 dan telah terealisasi sebesar Rp219.742.170 atau sebesar 100%;
- 3.5. Layanan Umum dan TI Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp205.748.000 dan telah terealisasi sebesar Rp205.746.547 atau sebesar 100%;
- 3.6. Layanan Hukum Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp149.036.000 dan telah terealisasi sebesar Rp148.966.689 atau sebesar 99,95%;
- 3.7. Layanan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.611.000 dan telah terealisasi sebesar Rp24.478.757 atau sebesar 99,46%;
- 3.8. Layanan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.652.000 dan telah terealisasi sebesar Rp26.646.000 atau sebesar 99,98%;

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 pada AKN V sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mencapai skor kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar **98,96** dari skor maksimal 105. Ketidaktercapaian ini merupakan implikasi dari beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
3. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
4. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
5. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
6. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

Permasalahan dan kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, antara lain :

1. masih terdapat ketidakkonsistenan antara unsur temuan dengan lampiran, uraian dalam kondisi, serta rujukan dalam lampiran. Sedangkan tidak tercapainya tingkat akurasi pada LHP mengindikasikan penghitungan ulang baik secara vertikal maupun horizontal atas angka yang tersaji dalam LHP belum sepenuhnya tepat sehingga IKU 1 masih belum mencapai target;
2. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Disamping itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah berupaya melakukan langkah percepatan penyelesaian tindak hasil pemeriksaan BPK. Namun, rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagian besar masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut sehingga tidak dapat diperhitungkan ke dalam capaian IKU 3. Selain itu, terdapat kecenderungan kurangnya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya kurang proaktifnya entitas dalam mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut;
3. Masih terdapat rendahnya tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan para pegawai BPK Bengkulu, sehingga IKU 9 masih belum mencapai target.
4. Masih kurangnya tingkat perencanaan anggaran yang dilakukan mengingat konsistensi antara perencanaan dan implementasi merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja anggaran.

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka pemenuhan target tahun berikutnya diantaranya :

1. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan berupaya membentuk Tim Checker (memberdayakan auditor khusus yang mempunyai ketelitian dan keahlian dalam melakukan pengecekan terutama akurasi dan konsistensi untuk meningkatkan perhatian pada kesalahan konsistensi dan akurasi yang terjadi pada tahun sebelumnya guna meningkatkan kinerja revidor konsep LHP secara redaksional dan berjenjang sebelum diterbitkannya LHP. Ketidakseimbangan peran pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan selalu dikoordinasikan dengan Biro SDM.
2. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara berkala telah melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu selain mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (SiPTL), juga membuka ruang konsultasi melalui helpdesk TLRHP dan mendorong kepada entitas untuk menginventarisir tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun-tahun yang telah lama agar segera dapat diselesaikan, baik yang mudah ditindaklanjuti menjadi status 1 (selesai ditindaklanjuti) maupun yang sulit ditindaklanjuti menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah) dengan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berupaya mendorong tingkat penggunaan Teknologi dan Informasi bagi seluruh pegawai, tidak hanya terkait pemeriksaan, namun juga terkait aplikasi non pemeriksaan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja pengelolaan keuangan dan anggaran, pencapaian target output, penyerapan anggaran, penyusunan rencana penarikan dana hingga pencairannya dan menyusun laporan bulanan kegiatan pelaksanaan Perwakilan setiap bulannya untuk memastikan seluruh kegiatan dan output perwakilan telah tercapai sesuai rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Lampiran 1

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi	97%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Lampiran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	89,17%	88,33%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	73,57%	69,86%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,57%	100,52%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,96%	100,37%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (4,91)	Memuaskan (4,38)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (90,38)	A (84,82)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi	97%	90,54%	99,04%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100,71%	75%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,11)	Memuaskan (3,91)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	94,59%	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	87,25%	90,03%

Lampiran 3

Indikator Kinerja Utama		Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Persentase Realisasi Tahun 2022 dibanding Target Kinerja Tahun ke-5
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	89,17 %	89,17%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	73,57%	98,09%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100,57%	100,57%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,96%	100,96%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Sangat Memuaskan (4,91)	98,20%
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,00)	AA (90,38)	102,70%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi	95%	96%	97%	98%	99%	90,54%	91,45%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100,71%	100,71%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)	Sangat Memuaskan (4,11)	105%
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	94,59%	94,59%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	87,25%	99,14%

Lampiran 4

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	%	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatkan Layanan Pemeriksaan 	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	89,17 %	89,17%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100,00%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	73,57%	98,09%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,57%	100,57%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100,00%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,96%	100,96%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangata Memuaskan (4,91)	98,20%
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	AA (90,38)	102,70%
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi	97%	90,54%	93,34%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100,17%	100,17%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,11)	105,00%
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	94,59%	94,59%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	87,25%	99,14%